

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil analisis tersebut dalam bab IV diatas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, sebagi berikut :

1. Ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (a) dan (g) serta ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai dua pengaruh oleh pelaku usaha (bank) yaitu pertama, pasal tersebut telah memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap nasabah dari klausula-klausula baku yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank; dan kedua, pasal tersebut memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang apabila tidak merubah format dan bentuk dari perjanjian baku tersebut, maka akibat hukumnya adalah :

- a. Secara perdata perjanjian itu batal demi hukum.
- b. Secara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hukuman tambahan berupa :
 - 1) perampasan barang tertentu;
 - 2) pengumuman keputusan hakim;
 - 3) pembayaran ganti rugi ;
 - 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen ;
 - 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran ;
 - 6) pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atas sudah sangat jelas bahwa diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat berpengaruh terhadap format maupun bentuk dari perjanjian baku, khususnya perjanjian kredit bank. Pihak bank yang selama ini telah mencantumkan klausula-klausula baku yang dilarang dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diwajibkan merubah bentuk maupun formatnya sesuai dengan apa yang telah dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bank Danamon cabang Yogyakarta sementara ini telah melakukan upaya-upaya yang bersifat ‘preventif’ dalam perjanjian bakunya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan tentang format, bentuk dan isi perjanjian sebelum mengadakan negosiasi.
- b. Mengadakan negosiasi dengan pihak nasabah.
- c. Adanya pasal kosong atau tambahan (*miscellaneous*) dalam perjanjian kredit bank.
- d. Pemberian ganti rugi.

5.2. Saran

1. Dalam hasil penelitian yang dilakukan terhadap nasabah pengguna fasilitas Kredit Pemilikan Rumah di Bank Danamon cabang Yogyakarta, terlihat bahwa sebagian besar nasabah bank pengguna kredit belum atau tidak mengetahui berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga nasabah juga belum mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen tetap tidak akan mengetahui hak-haknya apabila

tidak disosialisasikan secara meluas. Keberhasilan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tergantung kepada *political will* dari pemerintah, apakah pemerintah memang benar-benar ingin memberikan jaminan perlindungan konsumen yang lebih baik atau tidak ?. Caranya tentu saja melalui berbagai peraturan yang mendukung berupa Peraturan Pemerintah dan penegakkan hukum yang nyata.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tidak akan sanggup berjuang sendiri untuk mengkampanyekan program Undang-Undang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu, perlu didukung dari LSM lain serta berbagai anggota masyarakat lain untuk menyadarkan hak-hak konsumen. Pelaku usaha atau asosiasi industri juga ikut bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena jika tidak disebarluaskan bukankah mereka sendiri yang akan menerima akibatnya.

Terlepas dari kekurangan yang ada, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanpa dukungan konsumen dan pelaku usaha tidak ada artinya, Namun demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan momentum awal lahirnya paradigma baru undang-undang yang dapat menjamin hak-hak konsumen. Dalam era globalisasi dan kompetisi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen melahirkan konsumen yang kritis dan produsen yang kompetitif dan bermoral, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan langkah awal untuk memberdayakan konsumen.

2. Bank Danamon cabang Yogyakarta meskipun tanpa merubah format, bentuk dan isi dari klausula bakunya telah melakukan upaya-upaya bersifat preventif, yaitu berupa penjelasan, negosiasi dan memberikan ganti kerugian, namun demikian apabila tidak merubah bentuk, format dan isi perjanjian kreditnya maka ancaman batal demi hukum dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih

tetap ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Oleh karena hal tersebut di atas, pelaku usaha di Indonesia khususnya perbankan yang menggunakan perjanjian baku dalam usahanya, diharapkan untuk segera merubah format, bentuk maupun isi dari perjanjian bakunya.

Apalagi buruh/pekerja, YLKI maupun LSM-LSM sosial semakin menyerukan tuntutan untuk menegakkan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha. Dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan pendukungnya berupa Peraturan Pemerintah serta penegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1986.
2. Az. Nasution, Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
3. _____, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999.
4. Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
5. Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis), Djambatan, Jakarta, 1996 (Edisi Revisi).
6. Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
7. Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978.
8. Moch. Chidir Ali, et.al., Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung, 1993.
9. Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
10. Satrio, J., Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Aditya Bakti, Bandung, 1992.
11. Simorangkir, OP., Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, Yograt : Jakarta, 1983. Cetakan Ke – 4.
12. Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Press, Jakarta, 1977.
13. Subekti, Hukum Pejanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
14. _____, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1985.
15. Sutan Renny Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
16. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), liberty, Yogyakarta, 1986.
17. Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

18. _____, Hukum Dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
19. Thomas Suyatno, et.al., Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
20. _____, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Makalah

21. Bagir Manan, Prespektif Perlindungan Konsumen Hukum bagi Konsumen di Indonesia, makalah Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas, FH UNS, Surakarta, 1997.
22. J. Widianoro, Kajian Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Makalah disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan atas kerjasama fakultas hukum UAJY dan YLKI, 14 April 2000.
23. Mariam Darus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)", disampaikan dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta : Binacipta.
24. FX. Soedjiana dan TA Legowo, Perlindungan Konsumen, Makalah dibuat khusus untuk mangayubagyo ulang tahun ke-75 DR. Daoed Yoesoef.



Pertanyaan/Kuisisioner Untuk Bank Danamon

Penelitian Hukum tentang

“Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Danamon Tbk “

1. Apakah Bank Danamon mengetahui diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui sedikit
 - c. Mengetahui
 - d. Tidak mengetahui
2. KPR/KPM adalah merupakan perjanjian standar yang mengandung adanya klausula baku. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pertanyaan : sebagai pelaku usaha apakah Bank Danamon memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai klausula baku tersebut kepada konsumen ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apabila jawaban Anda a, apakah bank memperlakukan kosumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah Anda menjamin mutu fasilitas jasa yang anda berikan kepada konsumen ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apabila jawaban Anda a, apakah Anda memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji fasilitas tersebut ?
 - a. Ya, mengapa ?
 - b. Tidak, mengapa ?
6. Apabila ada keberatan dari konsumen apakah Anda memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen ?
 - a. Ya, mengapa ?
 - b. Tidak, mengapa ?

12. Apa yang dilakukan Bank Danamon ketika Anda belum mengerti tentang klausula-klausula dalam perjanjian kredit ?
 - a. Menjelaskan
 - b. Mendiamkan
 - c. Jawaban lain :.....
13. Ketika Anda menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Danamon Yogyakarta, bagaimana kedudukan Anda dengan Bank ?
 - a. Seimbang
 - b. Kurang seimbang
 - c. Tidak seimbang
 - d. Jawaban lain :.....
14. Apabila Anda menjawab b, apa yang mendorong Anda menggunakan fasilitas kredit dari Bank Danamon ?
 - a. Kebutuhan
 - b. Fasilitas khusus
 - c. Bunga ringan
 - d. Jawaban lain

“ Terima kasih atas partisipasi Anda “

Pertanyaan/Kuisisioner Untuk Konsumen

Penelitian Hukum tentang

“Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terhadap Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Danamon Tbk “

Berdasarkan kuisisioner ini saya mengharapkan partisipasi Anda untuk mengisinya dengan lengkap dan benar. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi data penelitian hukum perlindungan konsumen tentang : *Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Danamon Tbk.*

Petunjuk pengisian

- a. Isilah nama, jenis kelamin dan umur serta pendidikan Anda.
- b. Berilah tanda silang pada jawaban yang anda pilih

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

1. Apakah Anda mengetahui berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Sudah mengetahui
 - c. Kurang mengetahui
 - d. Belum/tidak mengetahui
2. Kalau Anda menjawab a, b dan c, dari mana Anda mengetahui berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut ?
 - a. Surat Kabar
 - b. Majalah
 - c. Radio
 - d. Televisi
 - e. Sumber lain :
3. Kalau Anda sudah mengetahui berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah Anda tahu hak-hak Anda sebagai konsumen ?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Sudah mengetahui
 - c. Kurang mengetahui
 - d. Jawaban lain :
4. Berapa kali Anda berhubungan dengan PT. Bank Danamon ?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. lebih dari 3 kali.

5. Mengapa Anda memilih fasilitas dari Bank Danamon Yogyakarta ?
 - a. Dapat dipercaya
 - b. Terlindungi
 - c. Pelayanan memuaskan
 - d. Ketiga-tiganya tersebut diatas
 - e. Jawaban lain :.....
6. Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pertanyaan : Anda sebagai konsumen apakah anda merasa sudah terlindungi oleh undang-undang tersebut ?
 - a. Sangat terlindungi
 - b. Belum terlindungi
 - c. Sudah terlindungi
 - d. Biasa-biasa saja
7. Bank Danamon dalam rangka memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat luas saat ini sedang gencar menyalurkan kredit konsumen dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) ataupun Kartu Kredit. Pertanyaan : fasilitas apakah yang saat ini Anda ambil ?
 - a. KPM
 - b. KPR
 - c. Kartu Kredit
 - d. Lain-lain :.....
8. Ketika Anda melakukan penandatanganan kredit, apakah sebelumnya Anda melakukan negoisasi dengan pihak Bank Danamon ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apabila Anda menjawab a, pada bagian apa yang Anda negoisasikan ?
 - a. Bentuk perjanjian
 - b. Isi perjanjian
 - c. Syarat-syarat yang diperjanjikan
 - d. Jawaban lain :.....
10. Ketika menandatangani fasilitas kredit dari Bank Danamon, apakah Anda sudah mengerti klausula yang digunakan Bank Danamon tersebut :
 - a. Sudah
 - b. Belum
11. Jika Anda menjawab b, apa alasan Anda belum mengerti ?
 - a. Letak atau bentuknya sulit terlihat
 - b. Tidak dapat dibaca secara jelas
 - c. Pengungkapannya sulit dimengerti
 - c. Jawaban ketiga-tiganya.

12. Apa yang dilakukan Bank Danamon ketika Anda belum mengerti tentang klausula-klausula dalam perjanjian kredit ?
- Menjelaskan
 - Mendiamkan
 - Jawaban lain :.....
13. Ketika Anda menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Danamon Yogyakarta, bagaimana kedudukan Anda dengan Bank ?
- Seimbang
 - Kurang seimbang
 - Tidak seimbang
 - Jawaban lain :.....
14. Apabila Anda menjawab b, apa yang mendorong Anda menggunakan fasilitas kredit dari Bank Danamon ?
- Kebutuhan
 - Fasilitas khusus
 - Bunga ringan
 - Jawaban lain

“ Terima kasih atas partisipasi Anda “

PERJANJIAN KREDIT

No :

KPM

Perjanjian ini dibuat pada hari ini,, tanggal oleh dan antara :

- I. P.T. BANK DANAMON INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui Cabangnya di beralamat di yang diwakili oleh, selanjutnya disebut **BANK**.
- II., pengusaha/swasta, *) bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak :
 1. untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari suami/istrinya, yaitu yang turut menandatangani perjanjian ini/sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal;*)
 2. selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari yang turut menandatangani perjanjian ini/sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal;*) selanjutnya disebut "**DEBITUR**".

BANK dan **DEBITUR** telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan perjanjian ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

BANK memberikan kepada **DEBITUR** fasilitas kredit untuk pembelian / kepemilikan kendaraan bermotor sampai sejumlah Rp. (.....) untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

PASAL 2

1. Jumlah kredit tersebut diberikan oleh **BANK** kepada **DEBITUR** secara sekaligus dan karenanya **DEBITUR** mengaku telah menerima kredit tersebut dan telah berhutang kepada **BANK** sejumlah uang sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya karena pemberian kredit tersebut serta denda yang mungkin timbul dikemudian hari yang besarnya selalu dapat terlihat pada catatan/administrasi **BANK**. Catatan/administrasi tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap **DEBITUR** mengenai jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK**.
2. **DEBITUR** wajib memberikan kepada **BANK** tanda terima uang, surat aksep/promissory note atau tanda bukti penerimaan uang lainnya yang ditentukan oleh **BANK**, yang bermeterai cukup, sebagai tanda penerimaan uang tersebut di atas dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Apabila kredit yang diberikan dipergunakan untuk membeli kendaraan bermotor dari dealer, maka **BANK** dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk mendebet rekening **DEBITUR** dan mengkredit rekening dealer atau cara-cara lain yang ditetapkan **BANK** atas jumlah kredit yang diberikan kepada **DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas setelah dikurangi kewajiban-kewajiban **DEBITUR** kepada **BANK** karena pemberian kredit ini.

PASAL 3

1. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut, **DEBITUR** dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada **BANK** :
 - a. Bunga sebesar %/tahun sehingga angsuran (pokok + bunga) setiap bulan sebesar Rp. selama (.....) bulan yang harus dibayar tiap-tiap bulan pada tanggal (.....) dimulai pada tanggal dan berakhir pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Jadwal Angsuran terlampir berikut perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jika pada tanggal pembayaran angsuran tersebut bukan merupakan hari kerja **BANK**, maka angsuran harus dibayar pada hari kerja **BANK** sebelum tanggal pembayaran angsuran yang dimaksud.
 - b. Provisi untuk selama jangka waktu kredit adalah sebesar % dari jumlah fasilitas kredit yang disetujui oleh **BANK** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 di atas dan dibayar **DEBITUR** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Apabila angsuran (pokok + bunga) tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, **DEBITUR** wajib membayar denda sebesar % per bulan dari jumlah angsuran (pokok + bunga) yang terlambat dibayar tersebut.
3. Apabila **DEBITUR** ingin melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka **DEBITUR** akan dikenakan denda sebesar % dari jumlah hutang pokok yang akan dilunasi.
4. Apabila beberapa angsuran dibayar lebih awal dari jadwal yang telah diperjanjikan, **DEBITUR** wajib membayar denda sebesar % dari jumlah angsuran yang akan dibayar lebih awal tersebut.
5. **DEBITUR** wajib untuk mempunyai rekening atau sejenisnya pada **BANK** selama **DEBITUR** memperoleh fasilitas kredit dari **BANK**.
6. **BANK** dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk mendebet rekening **DEBITUR** pada **BANK** sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 di atas guna pembayaran angsuran, provisi dan denda maupun biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit ini termasuk biaya-biaya yang dimaksud dalam pasal 10 di bawah ini.

7. **BANK** berhak sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda tersebut di atas maupun yang ditetapkan **BANK** dikemudian hari sesuai dengan keadaan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa perlu mendapat persetujuan dari **DEBITUR**.
8. **BANK** berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk sewaktu-waktu mengubah, menambah dan memperbaharui Jadwal Angsuran karena alasan apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal terjadi perubahan suku bunga atas fasilitas kredit, tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada **DEBITUR** dan tanpa **BANK** harus memperoleh persetujuan dari **DEBITUR**.

PASAL 4

DEBITUR wajib untuk membayar kembali hutangnya kepada **BANK** berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain dan kewajiban **DEBITUR** tersebut wajib dipenuhi tanpa **DEBITUR** berhak untuk memperhitungkannya dengan tagihan **DEBITUR** (jika ada) terhadap **BANK** dan untuk menuntut suatu pembayaran lain. **DEBITUR** dengan ini melepaskan segala haknya seperti yang disebut dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1 di atas, **BANK** berhak untuk setiap saat menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini atau mengurangi batas jumlah kredit yang dapat diberikan kepada **DEBITUR** berdasarkan perjanjian ini, dan berhak untuk menagih hutang **DEBITUR** kepada **BANK** setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya **DEBITUR** wajib membayar lunas seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, provisi, bunga, denda dan biaya-biaya yang timbul, dalam hal terjadi salah satu yang disebut di bawah ini :

1. jika **DEBITUR** lalai membayar suatu angsuran atau setiap tagihan **BANK** kepada **DEBITUR** pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian ini;
2. jika **DEBITUR** atau pihak yang memberikan jaminan atau yang menanggung/menjamin hutang **DEBITUR** (**PENJAMIN**) meminta penundaan pembayaran (surseance van betaling), dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh di bawah perwalian atau pengampunan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya;
3. jika **DEBITUR**/**PENJAMIN** meninggal dunia (dibubarkan/bubar apabila **DEBITUR**/**PENJAMIN** adalah suatu Badan Hukum, C.V., Firma, dsb.), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ketempat yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan **BANK** dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara;
4. apabila atas harta benda **DEBITUR**/**PENJAMIN**, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminkan atau yang tidak dijaminkan kepada **BANK**, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita eksekusi (executoriaal beslag) oleh pihak ketiga;
5. apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan **BANK** ;
6. jika kepada **BANK**, **DEBITUR**/**PENJAMIN** memberi keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, perusahaan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada **BANK** sehubungan dengan hutang **DEBITUR** kepada **BANK** atau jika **DEBITUR** menyerahkan surat aksep/promissory note, tanda bukti penerimaan uang, surat pemindahbukuan dan/atau dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh pihak (-pihak) yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga surat aksep/promissory note, tanda bukti penerimaan uang, surat pemindahbukuan dan/atau dokumen-dokumen lain tersebut tidak sah;
7. jika **DEBITUR**, baik sebelum maupun sesudah kredit diberikan oleh **BANK**, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada **BANK**;
8. apabila keadaan keuangan **DEBITUR**/**PENJAMIN** tidak mengizinkan karena force majeure, resesi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan **DEBITUR**/**PENJAMIN**;
9. apabila kendaraan bermotor yang dijaminkan kepada **BANK** disewakan oleh **DEBITUR**/**PENJAMIN** kepada pihak ketiga ;
10. jika kredit dipergunakan untuk tujuan lain dari maksud sebenarnya kredit diberikan;
11. jika **DEBITUR**/**PENJAMIN** lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian kredit ini atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat **BANK** akan dapat mengakibatkan **DEBITUR**/**PENJAMIN** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada **BANK**;
12. jika **DEBITUR**/**PENJAMIN** lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lain dimana pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin adalah **DEBITUR** dan/atau **PENJAMIN** dan apabila kelalaian atau pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menghentikan perjanjian yang dimaksud dan **DEBITUR**/**PENJAMIN** harus membayar seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih;
13. jika **DEBITUR** masuk dalam Daftar Kredit Macet dan / atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

PASAL 6

1. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya hutang **DEBITUR** kepada **BANK** yang telah dan akan ada dikemudian hari berikut bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan perjanjian ini atau Perjanjian Kredit yang akan dibuat dikemudian hari atau karena apapun juga, **DEBITUR** dan/atau **PENJAMIN** memberikan jaminan kepada **BANK** yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh **BANK** dan pengikatan jaminannya dibuat dalam suatu akta/perjanjian tersendiri.
2. Apabila menurut pendapat **BANK** nilai dari harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin hutang **DEBITUR** kepada **BANK**, maka atas permintaan pertama dari **BANK**, **DEBITUR** wajib menambah jaminan sesuai dengan kemerosotan nilai harta benda yang dijaminkan tersebut menurut penilaian dan penetapan **BANK**.

PASAL 7

Dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 di atas, apabila **DEBITUR** tidak melunasi seluruh hutangnya kepada **BANK** dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh **BANK**, maka **DEBITUR** wajib untuk menyerahkan kepada **BANK** harta benda yang dijaminkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah permintaan pertama **BANK** kepada **DEBITUR** dan/atau **PENJAMIN**.

PASAL 8

wajib dibayar DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.

PASAL 9

1. Selama hutang belum dibayar lunas, DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan kendaraan bermotor yang dijaminkan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh BANK, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat "Banker's Clause", yakni bahwa selama kendaraan bermotor yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda (kendaraan bermotor) yang dijaminkan kepada BANK. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "Banker's Clause" harus diserahkan kepada BANK.
2. Jika menurut pertimbangan BANK, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminkan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.
3. Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya - pada saat hak tersebut timbul - untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

PASAL 10

1. Disamping **DEBITUR** wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh **BANK**, maka segala biaya pada waktu pemberian kredit, penambahan, perubahan/pembaharuan atau perpanjangannya dan biaya-biaya yang timbul karena pemberian jaminan, pelunasan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh **BANK/Kuasanya** untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan **BANK** sehubungan dengan pemberian kredit tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, saksi, pengacara/penasehat hukum, balik nama, pengadilan, lelang, asuransi, penilai dan meterai, menjadi tanggungan **DEBITUR** dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh **BANK**.
2. Segala pajak yang akan ada/timbul sehubungan dengan pemberian kredit kepada **DEBITUR** adalah menjadi tanggungan **DEBITUR** kecuali Pajak Penghasilan Perusahaan **BANK**.

PASAL 11

Dalam hal BANK menjalankan hak-hak dan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang ataupun berdasarkan perjanjian' ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian kredit, maka baik tentang adanya maupun tentang jumlah utang DEBITUR kepada BANK tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbuka bagi para pihak, akan tetapi BANK berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada DEBITUR yaitu utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena utang tersebut, demikian dengan tidak mengurangi hak DEBITUR untuk setelah membayar seluruh utang tersebut kepada BANK, meminta pembayaran kembali dari BANK atas jumlah yang ternyata telah kelebihan dibayar oleh DEBITUR kepada BANK. Untuk kelebihan pembayaran tersebut, DEBITUR tidak berhak meminta bunga dan/atau ganti rugi apapun juga dari BANK.

PASAL 12

1. **DEBITUR** tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit/pemberian kredit dan perjanjian pemberian jaminan yang ada dan yang khususnya berlaku pada **BANK** serta yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari.
2. Perjanjian ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya serta segala akibatnya dikuasai oleh "Syarat-Syarat Umum Pemberian Kredit Perseroan Terbatas Bank Danamon Indonesia" (selanjutnya disebut Syarat-Syarat Umum) seperti yang ditetapkan dihadapan dan disimpan (gedeponerd) pada Notaris Nyonya SITI PERTIWI HENNY SHIDKI Sarjana Hukum, di Jakarta, dengan akta notaris tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (05-06-1992), Nomor 34 yang oleh **BANK** ditetapkan sebagai syarat-syarat pula dalam pemberian kredit kepada **DEBITUR** oleh **BANK** dan perjanjian ini. Syarat-Syarat Umum tersebut telah diketahui dan disetujui oleh **DEBITUR** tanpa perlu ditandatangani oleh **DEBITUR** dan Syarat-Syarat Umum tersebut dilampirkan pada perjanjian ini dan telah diterima **DEBITUR** dengan ditandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 13

Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar lunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian kredit kepada DEBITUR merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 14

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) kealamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

1. BANK

N a m a : P.T. BANK DANAMON INDONESIA

Alamat :

Telp./Fax :

2. DEBITUR

N a m a :

Alamat :

Telp./Fax :

(2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dimasukkan kedalam pos "tercatat" atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili BANK atau DEBITUR.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan kealamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 15

PASAL 16

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh BANK dan DEBITUR serta diatur secara tertulis.

PASAL 17

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di

Demikian perjanjian ini dibuat di, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan setelah dibaca dan dimengerti isinya, lalu ditandatangani oleh para pihak.

P.T. BANK DANAMON INDONESIA

DEBITUR

meterai

(.....)

(.....)

Menyetujui,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

PERJANJIAN KREDIT

No :

Perjanjian ini dibuat pada hari ini,, tanggal oleh dan antara :

I. P.T. BANK DANAMON INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui Cabangnya di beralamat di yang diwakili oleh, selanjutnya disebut **BANK**.

II., pengusaha/swasta, *) bertempat tinggal di

dalam hal ini bertindak :

1. untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari suami/istrinya, yaitu yang turut menandatangani perjanjian ini/sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal; *)
2. selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari yang turut menandatangani perjanjian ini/sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal; *)

selanjutnya disebut **DEBITUR**.

BANK dan **DEBITUR** telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan perjanjian ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. **BANK** memberikan kepada **DEBITUR** fasilitas kredit untuk pembelian/pemilikan tanah dan rumah/pembangunan rumah/perbaikan rumah *) sejumlah Rp. (.....) untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

PASAL 2

1. Jumlah kredit tersebut diberikan oleh **BANK** kepada **DEBITUR** secara sekaligus dan karenanya **DEBITUR** mengaku telah menerima kredit tersebut dan telah berhutang kepada **BANK** sejumlah uang sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya karena pemberian kredit tersebut serta denda yang mungkin timbul dikemudian hari yang besarnya selalu dapat terlihat pada catatan/administrasi **BANK**. Catatan/administrasi tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap **DEBITUR** mengenai jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK**.
2. **DEBITUR** wajib memberikan kepada **BANK** tanda terima uang, surat aksep/promissory note atau tanda bukti penerimaan uang lainnya yang ditentukan oleh **BANK**, yang bermeterai cukup, sebagai tanda penerimaan uang tersebut di atas dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Apabila kredit yang diberikan dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan dari developer, maka **BANK** dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk mendebet rekening **DEBITUR** dan mengkredit rekening developer atau cara-cara lain yang ditetapkan **BANK** atas jumlah kredit yang diberikan kepada **DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas setelah dikurangi kewajiban-kewajiban **DEBITUR** kepada **BANK** karena pemberian kredit ini.

PASAL 3

1. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut, **DEBITUR** dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada **BANK** :
 - a. Bunga sebesar %/tahun sehingga angsuran (pokok + bunga) setiap bulan sebesar Rp. (.....) selama (.....) bulan yang harus dibayar tiap-tiap bulan pada tanggal (.....) dimulai pada tanggal dan berakhir pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Jadwal Angsuran terlampir berikut perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jika pada tanggal pembayaran angsuran tersebut bukan merupakan hari kerja **BANK**, maka angsuran harus dibayar pada hari kerja **BANK** sebelum tanggal pembayaran angsuran yang dimaksud.
 - b. Provisi untuk selama jangka waktu kredit adalah sebesar % dari jumlah fasilitas kredit yang disetujui oleh **BANK** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 di atas dan dibayar **DEBITUR** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Apabila angsuran (pokok + bunga) tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, **DEBITUR** wajib membayar denda sebesar % per bulan dari jumlah angsuran (pokok + bunga) yang terlambat dibayar tersebut.
3. Apabila **DEBITUR** ingin melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka **DEBITUR** akan dikenakan denda sebesar % dari jumlah hutang pokok yang akan dilunasi.
4. Apabila beberapa angsuran dibayar lebih awal dari jadwal yang telah diperjanjikan, **DEBITUR** wajib membayar denda sebesar % dari jumlah angsuran yang akan dibayar lebih awal tersebut.
5. **DEBITUR** wajib untuk mempunyai rekening atau sejenisnya pada **BANK** selama **DEBITUR** memperoleh fasilitas kredit dari **BANK**.
6. **BANK** dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk mendebet rekening **DEBITUR** pada **BANK** sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 di atas guna pembayaran angsuran, provisi dan denda maupun biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit ini termasuk biaya-biaya yang dimaksud dalam pasal 10 di bawah ini.

7. **BANK** berhak sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda tersebut di atas maupun yang ditetapkan **BANK** dikemudian hari sesuai dengan keadaan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa perlu mendapat persetujuan dari **DEBITUR**.
8. **BANK** berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk sewaktu-waktu mengubah, menambah dan memperbaharui Jadwal Angsuran karena alasan apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal terjadi perubahan suku bunga atas fasilitas kredit, tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada **DEBITUR** dan tanpa **BANK** harus memperoleh persetujuan dari **DEBITUR**.

PASAL 4

DEBITUR wajib untuk membayar kembali hutangnya kepada **BANK** berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain dan kewajiban **DEBITUR** tersebut wajib dipenuhi tanpa **DEBITUR** berhak untuk memperhitungkannya dengan tagihan **DEBITUR** (jika ada) terhadap **BANK** dan untuk menuntut suatu pembayaran lain. **DEBITUR** dengan ini melepaskan segala haknya seperti yang disebut dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1 di atas, **BANK** berhak untuk setiap saat menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini atau mengurangi batas jumlah kredit yang dapat diberikan kepada **DEBITUR** berdasarkan perjanjian ini, dan berhak untuk menagih hutang **DEBITUR** kepada **BANK** setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya **DEBITUR** wajib membayar lunas seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, provisi, bunga, denda dan biaya-biaya yang timbul, dalam hal terjadi salah satu yang disebut di bawah ini :

1. jika **DEBITUR** lalai membayar suatu angsuran atau setiap tagihan **BANK** kepada **DEBITUR** pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian ini;
2. jika **DEBITUR** atau pihak yang memberikan jaminan atau yang menanggung/menjamin hutang **DEBITUR** (**PENJAMIN**) meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya;
3. jika **DEBITUR/PENJAMIN** meninggal dunia (dibubarkan/bubar apabila **DEBITUR/PENJAMIN** adalah suatu Badan Hukum, C.V., Firma, dsb.), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ketempat yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan **BANK** dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara;
4. apabila atas harta benda **DEBITUR/PENJAMIN**, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminakan atau yang tidak dijaminakan kepada **BANK**, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executoriaal beslag*) oleh pihak ketiga;
5. apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan **BANK** ;
6. jika kepada **BANK**, **DEBITUR/PENJAMIN** memberi keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, perusahaan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada **BANK** sehubungan dengan hutang **DEBITUR** kepada **BANK** atau jika **DEBITUR** menyerahkan surat aksep/ promissory note, tanda bukti penerimaan uang, surat pemindahbukuan dan/atau dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh pihak (-pihak) yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga surat aksep/promissory note, tanda bukti penerimaan uang, surat pemindahbukuan dan/atau dokumen-dokumen lain tersebut tidak sah;
7. jika **DEBITUR**, baik sebelum maupun sesudah kredit diberikan oleh **BANK**, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada **BANK**;
8. apabila keadaan keuangan **DEBITUR/PENJAMIN** tidak mengizinkan karena *force majeure*, resesi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan **DEBITUR/PENJAMIN**;
9. apabila tanah dan bangunan/rumahnya yang dijaminakan kepada **BANK** disewakan oleh **DEBITUR/PENJAMIN** kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari **BANK**;
10. Jika kredit dipergunakan untuk tujuan lain dari maksud sebenarnya kredit diberikan;
11. jika **DEBITUR/PENJAMIN** lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian kredit ini atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat **BANK** akan dapat mengakibatkan **DEBITUR/PENJAMIN** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada **BANK**;
12. jika **DEBITUR/PENJAMIN** lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lain dimana pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin adalah **DEBITUR** dan/atau **PENJAMIN** dan apabila kelalaian atau pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menghentikan perjanjian yang dimaksud dan **DEBITUR/PENJAMIN** harus membayar seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih;
13. jika **DEBITUR** masuk dalam Daftar Kredit Macet dan / atau Daftar Hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

PASAL 6

1. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya hutang **DEBITUR** kepada **BANK** yang telah dan akan ada dikemudian hari berikut bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan perjanjian ini atau Perjanjian Kredit yang akan dibuat dikemudian hari atau karena apapun juga, **DEBITUR** dan/atau **PENJAMIN** memberikan jaminan kepada **BANK** yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh **BANK** dan pengikatan jaminannya dibuat dalam suatu akta/perjanjian tersendiri.
2. Apabila menurut pendapat **BANK** nilai dari harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin hutang **DEBITUR** kepada **BANK**, maka atas permintaan pertama dari **BANK**, **DEBITUR** wajib menambah jaminan sesuai dengan kemerosotan nilai harta benda yang dijaminakan tersebut menurut penilaian dan penetapan **BANK**.

PASAL 7

1. Dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 di atas, apabila **DEBITUR** tidak melunasi seluruh hutangnya kepada **BANK** dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh **BANK**, maka **DEBITUR** wajib untuk menyerahkan kepada **BANK** tanah dan bangunan/rumah yang dijaminakan dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal "Surat Permintaan Pengosongan Dan Penyerahan" yang dikirim oleh **BANK** kepada **DEBITUR** dan/atau **PENJAMIN** pada alamat terakhir yang diketahui **BANK**.
2. Apabila **DEBITUR** tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, **BANK** dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh **DEBITUR** untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dari penghuni dan barang-barang yang ada didalamnya, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

3. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk tidak akan melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang dapat menghambat usaha BANK dalam melaksanakan hak-hak BANK tersebut di atas.

PASAL 8

Apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN tidak dapat atau lalai memenuhi kewajibannya (mereka) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang ada, maka BANK berhak, tanpa perantaraan Pengadilan dan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk langsung menjual harta benda yang dijaminkan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik tanah (dan rumah) yang dijaminkan kepada BANK. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK

PASAL 9

1. Selama hutang belum dibayar lunas, DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminkan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh BANK, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat "Banker's Clause", yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik tanah (dan rumah) yang dijaminkan kepada BANK. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "Banker's Clause" harus diserahkan kepada BANK
2. DEBITUR atas tanggungan sendiri wajib mengasuransikan dirinya (asuransi jiwa kredit/credit life insurance) pada perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh BANK dengan minimum uang pertanggungan sebesar plafond kredit yang diperoleh DEBITUR dan wajib mencantumkan "Banker's Clause", sedangkan asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi jiwa kredit beserta "Banker's Clause" diserahkan kepada BANK.
3. Jika menurut pertimbangan BANK, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminkan serta asuransi yang dimaksud pada pasal 9 ayat 2 di atas dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.
4. Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya - pada saat hak tersebut timbul - untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

PASAL 10

1. Disamping DEBITUR wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh BANK, maka segala biaya pada waktu pemberian kredit, penambahan, perubahan/pembaharuan atau perpanjangan dan biaya-biaya yang timbul karena pemberian jaminan, pelunasan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh BANK/Kuasanya untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan BANK sehubungan dengan pemberian kredit tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris/PPAT, saksi, pengacara/penasihat hukum, hipotik, sortifikat, balik nama, pengadilan, lelang, royalti, asuransi, penilai dan meterai, menjadi tanggungan DEBITUR dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.
2. Segala pajak yang akan ada/timbul sehubungan dengan pemberian kredit kepada DEBITUR adalah menjadi tanggungan DEBITUR kecuali Pajak Penghasilan Perusahaan BANK.

PASAL 11

Dalam hal BANK menjalankan hak-hak dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang ataupun berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian kredit, maka baik tentang adanya maupun tentang jumlah hutang DEBITUR kepada BANK tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbukti bagi para pihak, akan tetapi BANK berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada DEBITUR yaitu hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena hutang tersebut, demikian dengan tidak mengurangi hak DEBITUR untuk setelah membayar seluruh hutang tersebut kepada BANK, meminta pembayaran kembali dari BANK atas jumlah yang ternyata telah kelebihan dibayar oleh DEBITUR kepada BANK. Untuk kelebihan pembayaran tersebut, DEBITUR tidak berhak meminta bunga dan/atau ganti rugi apapun juga dari BANK.

PASAL 12

1. DEBITUR tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit/pemberian kredit dan perjanjian pemberian jaminan yang ada dan yang khususnya berlaku pada BANK serta yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari.
2. Perjanjian ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya serta segala akibatnya dikuasai oleh "Syarat-Syarat Umum Pemberian Kredit Perseroan Terbatas Bank Danamon Indonesia" (selanjutnya disebut Syarat-Syarat Umum) seperti yang ditetapkan dihadapan dan disimpan (gedeponeerd) pada Notaris Nyonya SITI PERTIWI HENNY SHIDKI Sarjana Hukum, di Jakarta, dengan akta notaris tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (05-06-1992), Nomor 34 yang oleh BANK ditetapkan sebagai syarat-syarat pula dalam pemberian kredit kepada DEBITUR oleh BANK dan perjanjian ini. Syarat-Syarat Umum tersebut telah diketahui dan disetujui oleh DEBITUR tanpa perlu ditandatangani oleh DEBITUR dan Syarat-Syarat Umum tersebut dilampirkan pada perjanjian ini dan telah diterima DEBITUR dengan ditandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 13

Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar lunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian kredit kepada DEBITUR merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 14

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) kealamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

1. BANK

N a m a : P.T. BANK DANAMON INDONESIA

Alamat :

Telp./Fax :

2. DEBITUR

N a m a :

Alamat :

Telp./Fax :

(2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dimasukkan kedalam pos "tercatat" atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili BANK atau DEBITUR.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan kealamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 15

PASAL 16

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh BANK dan DEBITUR serta diatur secara tertulis.

PASAL 17

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kopaniteraan Pengadilan Negeri di yang demikian dengan tidak mengurangi hak BANK untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada DEBITUR berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian perjanjian ini dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dan setelah dibaca dan dimengerti isinya, lalu ditandatangani oleh para pihak.

P.T. BANK DANAMON INDONESIA

DEBITUR

meterai

(.....)

(.....)

Menyetujui,

(.....)

No. B.246- HKM

Jakarta, 30 Maret 2001

Surat Keteranganapb
h
-C66

Yang bertanda-tangan dibawah ini ;

Nama : Edi Effendi
Jabatan : Kadiv. Legal, Corporate Secretary & Communication
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Permadi Widhiyatno, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Magister Hukum, adalah benar telah melakukan riset dan penelitian sehubungan dengan penulisan thesis yang bertopik "**Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.,**" pada Sub. Divisi Bidang Hukum Bank Danamon Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.,
Sub. Divisi Bidang Hukum



Edi Effendi
Kepala Divisi

CC.

- Up. Ketua Program Pasca Sarjana Magister Hukum UAJY
- Up. Personal File Ybs.

